



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN TINGKAT
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2012-2016)**

Oleh :

Wahyudi Pujiyanto *)

Jeni Susyanti **)

Afi Rachmat Slamet ***)

Email : pujiantowahyudi@gmail.com

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

ABSTRACT

In carrying out the regional autonomy whether it can be said success and independent or not, it can be known from the ability of regional financial management as one of those indicator. In this research, regional financial area consists of regional financial independence ratio, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), effectiveness ratio, activity ratio, the degree of decentralization ratio, and growth ratio to see the ability of financial performance. The financial performance reflects to the ability of regional finance. The aim of this research was to know how financial performance and the degree of financial independence of Pasuruan District in regional autonomy era.

The writer used descriptive with quantitative design, and secondary data that refers to the available information. Several sources of data that used statistic of Pasuruan District, the data of APBD of Pasuruan District fiscal year 2012-2016, and realization data APBD of Pasuruan District fiscal year 2012-2016.

The results of this research found that regional has moderate performance; however, in autonomy perspective was inadequate due to regional was in intervention of the central government. In similar way, it could not be said independence because of constructive relation pattern. The local government was prioritizing the fund to operating expenses. However, growth ratio was moderate and The Governor of Pasuruan District was effective to realize PAD.

Key words: financial performance, financial independence, regional financial, regional autonomy , and APBD.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Pasuruan berada di delta jalur ekonomi Surabaya – Jember/banyuwangi/Bali, Surabaya – Malang, dan Malang – Jember/Banyuwangi/Bali. Yang sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis. Terlebih sekarang sudah dibangun Tol Gempol–Pandaan dan pembangunan jalan tol Gempol – Pasuruan dan Pandaan – Malang yang menjadikan kabupaten Pasuruan menjadi pilihan yang tepat bagi pengembangan investasi manufaktur. Serta kawasan industri yang berada di Kabupaten Pasuruan yaitu kecamatan Beji, Gempol, Pandaan, Sukorejo dan Rembang tersedia lahan yang diperuntukan sebagai pembangunan kawasan industri.

Lebih dari 10 tahun Indonesia memasuki masa otonomi daerah, berawal dari adanya reformasi. Sampai sekarang implementasi otonomi daerah sudah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR bersepakat merevisi Undang-Undang dan mengesahkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan berdasar UU No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 yang menjelaskan pengertian otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang- Undang. Kewenangan suatu daerah yaitu mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan seperti dalam bidang moneter dan fiskal, peradilan, politik luar negeri, pertahanan keamanan, agama, serta kewenangan bidang lain.

Dengan pemberlakuan otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut. Otonomi daerah dan desentralisasi tidak bisa terlepas dan saling berkaitan dari suatu pelaksanaan pembangunan. Pembangunan daerah adalah wujud dari peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Suatu pembangunan daerah tidak akan terwujud apabila tidak dibarengi dengan pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Keberhasilan dan kesuksesan yang dimaksud bukanlah sesuatu yang dilihat melalui pencitraan media, namun keberhasilan dan kesuksesan yang berdiri tegak diatas kepuasan masyarakat dan individu warga di daerah yang disebutkan melalui serangkaian program pembangunan yang komprehensif di segala bidang, seperti pengelolaan APBD secara efektif dan efisien.

Kebijakan pemberian otonomi daerah juga desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab pada suatu daerah adalah sebuah tujuan strategis yaitu otonomi daerah merupakan salah satu jawaban dari sebuah permasalahan lokal pada bangsa Indonesia seperti ketidak merataan pembangunan, kemiskinan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan Sumber Daya Manusia. Otonomi daerah juga merupakan langkah yang strategis dalam menyongsong di era globalisasi dengan memperkuat perekonomian yang ada di daerah. Disamping itu juga harus ada upaya dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga publik daerah yang harus dilakukan secara terintegrasi sehingga otonomi yang diberikan kepada suatu daerah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga dituntut mampu manajemen dan mendukung dalam operasional pembangunan daerah yang harus diatur secara hati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan kinerja keuangan daerah yang baik bisa dilihat dari beberapa indikator, yaitu salah satunya adalah penyampaian Laporan Keuangan Daerah (LKPD) secara tepat waktu dan kualitas opini BPK atas LKPD yang meningkat akan menjadi sebuah indikator utama demi mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik (Utomo, 2012).

Oleh karena itu pada otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut supaya lebih baik dibanding sebelum era otonomi, yaitu menggunakan aspek reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*. Aspek yang pertama yaitu bahwa daerah diberi kewenangan atas urusan pembiayaan daerah yaitu dengan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal) sebagai kekuatan utama. Aspek kedua adalah pada sisi manajemen pengeluaran daerah, yaitu bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan tentunya juga akuntabel dan menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Pada pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan satuan kerjanya setiap tahun sebagai suatu layanan publik. Kinerja pengelolaan keuangan daerah setidaknya mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efektif, efisien dan memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, keadilan dan akuntabel akan menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian serta kemandirian di suatu daerah, maka suatu daerah yang kinerja keuangannya baik menandakan daerah tersebut mempunyai kemampuan keuangan dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Kaunang, 2016).

Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan, sangat sesuai untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasuruan, dengan rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), Rasio Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, Rasio Derajat Desentralisasi, dan Rasio Pertumbuhan sebagai analisis pengukuran kinerja keuangan daerah Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagai analisis pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Pasuruan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), Rasio Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, Rasio Derajat Desentralisasi, dan Rasio Pertumbuhan yang digunakan sebagai analisis pengukuran kinerja keuangan daerah Kabupaten Pasuruan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti dapat memperoleh pengetahuan mengenai kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Serta bagi pemerintah Kabupaten, penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah, kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat serta mengetahui sektor yang lebih berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bisa di

kembangkan dan lebih memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan.

3. Sedangkan bagi akademisi, diharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tambahan informasi dan sebagai contoh referensi dalam proses pengembangan yang lebih lanjut lagi yaitu yang berhubungan tentang Keuangan Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Keuangan Daerah

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah

2. Kinerja Keuangan

Kinerja Menurut Bastian (2006) ialah sebuah konstruk yang mempunyai sifat multidimensional, dan pengukurannya bervariasi tergantung faktor pembentuk kinerja. Dan Sudaryo (2017) Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja dengan keuangan sebagai indikator kinerjanya.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Simanjuntak (2013) adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang.

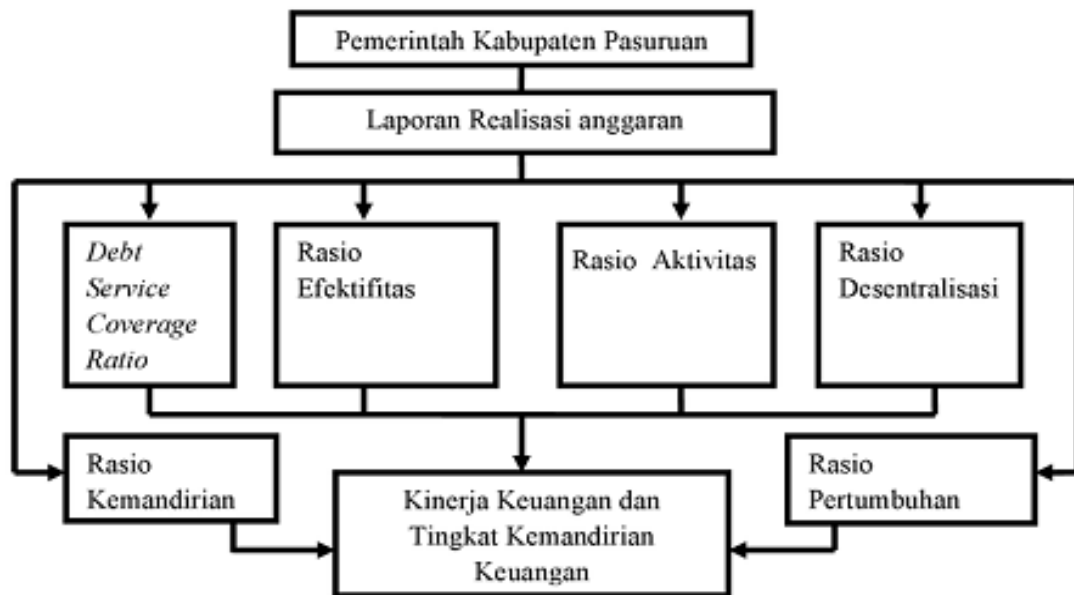
4. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yaitu Otoritas: anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Perencanaan anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Pengawasan: Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Alokasi: Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran. Distribusi: Kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Stabilisasi: Anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kerangka Konseptual



METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data realisasi APBD Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2012-2016

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif ialah suatu analisis dengan menggunakan data yang diukur pada suatu skala numerik. Juga analisis deskriptif ialah suatu bentuk analisis yang menggambarkan suatu pola yang sesuai dalam data.

Operasional Variabel

1. Dalam Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapakan transfer dana dari pemerintah pusat.

$$RKKD = \frac{\text{Total Penerimaan PAD}}{\text{Total Bantuan Daerah dan Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio DSCR yaitu perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan Sumber Daya Alam, dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah yaitu keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerja pemerintahan, salah satunya dapat diukur dengan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut.

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah yaitu memperlihatkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Apabila makin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin artinya persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang dipergunakan untuk penyedia sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil.

$$RBO = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$RBM = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

5. Rasio Derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah.

$$RBM = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

6. Rasio Pertumbuhan untuk mengukur besaran kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan juga meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

$$\text{Pertumbuhan ..} = \frac{t - t-1}{t-1} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	RKKD	Pola Hubungan
2012	14,49%	Instruktif
2013	18,31%	Instruktif
2014	24,06%	Instruktif
2015	24,63%	Instruktif
2016	21,41%	Instruktif
Rata rata	20,58%	Instruktif

Sumber : (Data diolah,2018)

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Pasuruan yang dapat dikatakan masih sangat rendah, karena dalam lima tahun terakhir tetap mengalami pola hubungan instruktif dimana pemerintah pusat sangat berperan dominan dibandingkan dari kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan.

2. Rasio DSCR

Tahun	DSCR (%)
2012	-47.62%
2013	-21.22%
2014	21.36%
2015	18.74%
2016	8.48%
rata rata	-4.05%

Sumber : (Data diolah,2018)

Kabupaten Pasuruan di dua tahun ini belum layak jika melakukan pinjaman dikarenakan di tahun 2012 dan 2013 ini tidak mencapai 2,5%.

3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Tahun	REKD	Kriteria
2012	118.43%	Efektif
2013	118.37%	Efektif
2014	123.53%	Efektif
2015	109.67%	Efektif
2016	102.12%	Efektif
Rata rata	114.43%	Efektif

Sumber : (Data diolah,2018)

Hasil rasio efektivitas Kabupaten Pasuruan pada periode tahun anggaran 2012-2016 adalah sangat efektif melebihi target. Dimana dalam lima tahun terakhir persentasenya diatas 100%.

4. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah

Tahun	Rasio Belanja Operasi	Rasio Belanja Modal
2012	82.42%	14.85%
2013	79.49%	13.59%
2014	73.32%	14.80%
2015	67.83%	18.45%
2016	67.78%	29.72%
Rata rata	74.17%	18.28%

Sumber : (Data diolah, 2018)

Pemerintah Kabupaten Pasuruan lebih mengarah kepada kepentingan belanja rutin atau belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Dalam total rasio belanja rutin ataupun total rasio belanja modal terhadap APBD masih belum ada dasar besaran yang pasti belanja modal terhadap APBD yang ideal, dikarenakan sangat dipengaruhi oleh dinamisasi pembangunan dan besarnya suatu kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan yang di targetkan.

5. Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun	%	Kriteria
2012	12.36%	Kurang
2013	15.29%	Kurang
2014	19.09%	Kurang
2015	18.99%	Kurang
2016	17.04%	Kurang
Rata rata	16.55%	Kurang

Sumber : (Data diolah, 2018)

Hasil dari rasio Derajat Desentralisasi jika dilihat dari hasil kriterianya atau tingkat desentralisasi menunjukkan Kabupaten Pasuruan dari tahun ke tahun dinyatakan kurang.

6. Rasio Pertumbuhan

Pertumbuhan	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan	-	15,44%	21,33%	14,08%	12,03%
PAD	-	42,75%	51,51%	13,48%	0,52%
Belanja Operasi	-	11,35%	11,90%	5,54%	11,94%
Belanja Modal	-	5,60%	32,16%	42,19%	80,45%
Rata-rata	-	18,79%	29,22%	18,82%	26,23%

Sumber : (Data diolah, 2018)

Dari hasil analisis Rasio Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang baik walaupun di beberapa tahun terjadi penurunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Jika dilihat dari analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun anggaran 2012-2016 terlihat dari hasil analisis yang hanya mendapatkan nilai sebesar 20,58% dikatakan rendah karena hasil analisis menunjukkan pola hubungan instruktif yang artinya peranan dari pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Kabupaten Pasuruan sendiri dan masih belum mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Pada hasil analisis Rasio *Debt Service Coverage Ratio* Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2012-2016 memperlihatkan bahwa hasil rata-rata menunjukkan nilai - 4,05% yang di bawah batas minimal 2,5 untuk dikatakan layak, maka Kabupaten Pasuruan belum layak dalam melakukan pinjaman dana.
3. Dari hasil analisis rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan pada periode tahun anggaran 2012-2016 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 114,43% memperlihatkan hasil yang sangat efektif. Maka dalam hal ini Kabupaten Pasuruan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sangat efektif, dan pemerintah daerah dikatakan mampu dalam menjalankan tugasnya.
4. Hasil analisis Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2012-2016 memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan lebih memprioritaskan pengelolaan dananya pada belanja operasi, dan berarti belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil dan pembangunan kurang dinikmati oleh masyarakat, karena terbukti nilai rasio belanja operasi sebesar 74,17% lebih besar daripada nilai rasio belanja modal yang hanya sebesar 18,28%.
5. Pada hasil analisis Rasio Desentralisasi Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2012-2016 memperlihatkan hasil nilai rata-rata sebesar 16,55% yang masuk dalam kriteria kurang, yang artinya bahwa pemerintah pusat belum dapat menyerahkan kewenangan dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan daerah. Dan ukuran itu menunjukkan bahwa suatu wewenang juga tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna melaksanakan pembangunan masih tidak bisa lepas dari peran pemerintah pusat.
6. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2012-2016 memperlihatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan sebesar 42,75% dan terendah pada tahun 2016 yang sebesar 0,52%. Pertumbuhan pada Pendapatan tertinggi terjadi di tahun 2014 sebesar 21,33% dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 12,03%. Dan selanjutnya pertumbuhan pada belanja operasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 11,94% dan terendah pada tahun 2015 sebesar 5,54%. Dan selanjutnya pertumbuhan belanja Modal tertinggi terjadi pada tahun 2016 pertumbuhan terendah pada tahun 2013 sebesar 5,60%.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini hanya terdapat enam analisis rasio dan data yang digunakan dua tahun terakhir hanya sampai di tahun 2016.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Campur tangan pemerintah pusat di Kabupaten Pasuruan masih sangat dominan, maka Kabupaten Pasuruan harus bisa meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah demi terwujudnya suatu kemandirian di Kabupaten Pasuruan dengan cara intensifikasi ataupun ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu seperti mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefektifkan cara pemungutannya pada objek seperti perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pelayanan serta pengawasan dan cara ekstensifikasi seperti usaha dalam peningkatan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru dengan pendataan dan pendaftaran atau dengan cara menggali pajak baru.

2. Bagi peneliti berikutnya

Dalam penelitian ini menggunakan enam rasio keuangan, dengan periode tahun anggaran 2012-2016. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah rasio efisiensi ataupun ketergantungan keuangan daerah, agar bervariasi dan lebih akurat. Selanjutnya peneliti juga berharap agar peneliti selanjutnya lebih memperluas cakupan lingkup penelitian dan tambahan rasio-rasio lain, karena pada penelitian ini terdapat kendala ketersediaan data untuk analisis rasio efisiensi dan hanya terbatas di Kabupaten Pasuruan.

DAFTAR PUSTAKA

Fambayun, D. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dan Tingkat kemandirian Daerah Di Kabupaten Magetan (Tahun Anggaran 2009-2013). *Jurnal Akuntansi UNESA*.

Kaunang, C. E. 2016. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16.

UTOMO, J. 2012. Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal keuangan*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

Wahyudi Pujianto *)	: Adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma
Jeni Susyanti **)	: Adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang.
Afi Rachmat Slamet ***)	: Adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang.